

ABSTRAK

ANALISIS PIDANA TERHADAP PELAKU PEMALSUAN DOKUMEN TANDA TANGAN DALAM AKTA JUAL BELI SEBAGAI BUKTI PERALIHAN HAK DIHUBUNGGAN DENGAN PASAL 266 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DI WILAYAH POLRES GARUT

Oleh
Panji Salura
NIM 82338220031

Akhir-akhir ini semakin maraknya kejadian tindak pidana yang bermacam-macam, salah satunya adalah perbuatan memalsukan surat penting atau dokumen atau dikenal dengan tindak pidana pemalsuan tanda tangan, dikarenakan di dalam surat penting atau dokumen tentu ada sebuah tanda tangan, sehingga tindak pidana pemalsuan tanda tangan dapat juga dianggap sebagai tindak pidana pemalsuan dokumen atau surat penting. Adapun yang menjadi tujuan penelitian adalah sebagai berikut : Untuk mengetahui analisis pidana terhadap pelaku pemalsuan dokumen tanda tangan dalam akta jual beli sebagai bukti peralihan hak, dan Untuk mengetahui Pertimbangan hakim terhadap pemidanaan tindak pidana pada pelaku pemalsuan dokumen tanda tangan dalam akta jual beli sebagai bukti peralihan hak dihubungkan dengan pasal 266 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Wilayah Polres Garut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif atau yuridis normatif. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan tanda tangan dokumen sebagai bukti peralihan dilakukan dengan mengikuti ketentuan yang ada didalam Pasal 266 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) . Dimana berdasarkan Pasal 266 KUHP tersebut pemidanaan berupa sanksi administrasi dan sanksi pidana. Didalam perkara Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Grt diindikasikan bahwa dengan adanya pemalsuan tanda tangan dokumen terhadap Surat Hak Milik Rumah milik alm ayah IM maka Terdakwa Y dan S harus dijatuhkan berupa tindak pidana sesuai dengan aturan Perundang-Undangan yang berlaku. 2) Pertimbangan Hakim terhadap tindak pidana yang dilakukan terdakwa, majelis hakim mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik berdasarkan alat bukti maupun barang bukti, sehingga diperoleh fakta bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana pemalsuan dengan pemberatan, bahwa didalam perkara Nomor Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Grt, berdasarkan fakta-fakta terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana pemalsuan surat berupa SHM Tanah yang dimana rumah tersebut masih bersengketa dengan pemberatan sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Kata Kunci : Pidana, Pemalsuan dokumen, Pasal 266 KUHP

ABSTRACT

CRIMINAL ANALYSIS OF PERSONS FOR FORGING SIGNATURE DOCUMENTS IN DEEDS OF SALE AND PURCHASE AS PROOF OF TRANSFER OF RIGHTS CONNECTED WITH ARTICLE 266 OF THE CRIMINAL LAW BOOK IN THE GARUT POLICE AREA

By
Panji Salura
NIM 82338220031

Lately, there have been increasing incidents of various criminal acts, one of which is the act of falsifying an important letter or document or known as the crime of falsifying a signature, because in an important letter or document there is of course a signature, so it is a crime of falsifying a signature. hand can also be considered a criminal act of falsifying important documents or letters. The objectives of the research are as follows: To find out the criminal analysis of perpetrators of forging signature documents in deeds of sale and purchase as proof of transfer of rights, and to find out the judge's considerations regarding criminal penalties for perpetrators of forgery of signature documents in deeds of sale and purchase as proof of transfer. rights are linked to article 266 of the Criminal Code in the Garut Police Area. The research method used is a normative legal or normative juridical research method. This research is descriptive analytical in nature. The results of the research show that: 1) Punishment of perpetrators of the crime of forging document signatures as proof of transfer is carried out by following the provisions in Article 266 of the Criminal Code (KUHP). Based on Article 266 of the Criminal Code, punishment takes the form of administrative sanctions and criminal sanctions. In case Number 27/Pdt.G/2023/PN Grt it is indicated that due to the falsification of the document signature on the House Ownership Certificate belonging to IM late father, the Defendants Y and S must be prosecuted as a criminal offense in accordance with the applicable laws and regulations. 2) The judge's consideration of the criminal act committed by the defendant, the panel of judges considers it based on the facts revealed in the trial, both based on evidence and material evidence, so that the fact is obtained that the defendant has committed the crime of forgery with aggravation, that in case Number 27/Pdt .G/2023/PN Grt, based on the facts the defendant has been proven to have committed the criminal act of forgery of documents in the form of SHM Land where the house is still in dispute with aggravation as charged by the Public Prosecutor.

Keywords: Crime, document falsification, Article 266 of the Criminal Code